

Peran Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam Pemulihan UMKM Pasca Pandemi Covid-19

Ismaul Aufa¹, M. Elfan Kaukab², Ahmad Fahmi Nugroho³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Indonesia

³Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

maulaufa17@gmail.com, elvankaukab@yahoo.com, fahminugroho909@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh peran pemerintah terhadap pemulihan UMKM; (2) Pengaruh restrukturisasi kredit terhadap pemulihan UMKM; (3) Pengaruh kredit modal kerja terhadap pemulihan UMKM; (4) Pengaruh digitalisasi UMKM terhadap pemulihan UMKM.

Metode – Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS dengan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji F, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi (R^2). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM kaki lima yang berada di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan rumus *slovin*, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel responden.

Hasil – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pemulihan UMKM; (2) Restrukturisasi kredit berpengaruh positif terhadap pemulihan UMKM; (3) Kredit modal kerja tidak memberikan pengaruh terhadap pemulihan UMKM; (4) Digitalisasi UMKM berpengaruh positif terhadap pemulihan UMKM.

Implikasi – Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden.

Orisinalitas – Penelitian ini melihat hubungan beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan pemulihan UMKM di Kabupaten Wonosobo.

Kata kunci – Peran Pemerintah, Restrukturisasi Kredit, Kredit Modal Kerja, Digitalisasi, UMKM

Pendahuluan

Di Indonesia, perdebatan terkait masalah konsep perekonomian rakyat masih terus berlanjut. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan pembangunan kedepannya yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek serta hasil pembangunan, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus menduduki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan padanan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang-perorang. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, berarti bahwa perekonomian nasional

berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri (Muhammad, 2000).

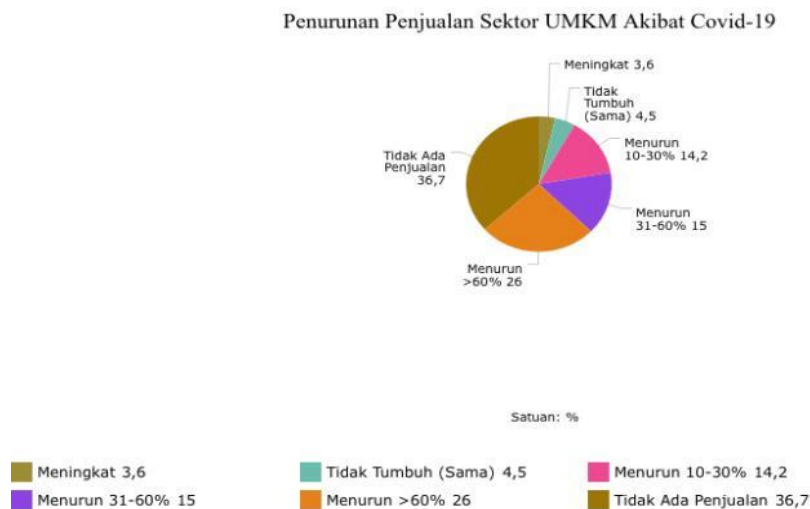
Keberadaan UMKM harus tetap dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat pedesaan, bahwa usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja, pengangguran, jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi daerah (Choiririzal, 2020). UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan UMKM juga akan berdampak positif pada peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah penduduk miskin, pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi. Serta UMKM juga merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan Amerika Serikat. Tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh UMKM (Roswita Hafni, 2017).

Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan sektor ekonomi daerahnya, dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera. Perhatian pemerintah ditunjukkan dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk terlaksananya usaha kecil, dari mulai memberikankeringanan pajak, kemudahan mendapatkan izin usaha, serta memberikan pengarahan dan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil (Giovani, 2018).

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Rahmah, 2020). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Wonosobo. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo yang berperan sebagai pemeran utama dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada industri yang memiliki kesulitan untuk membayar kredit/cicilan (*credit constraint*) khususnya UMKM dan industri yang terkena dampak paling besar dari pandemi *Covid-19* yang telah berjalan mulai dari tahun 2020 (Kaukab, 2021). Tidak berjalannya perekonomian dalam beberapa waktu terakhir (kerajinan tangan, tekstil, restoran, hotel, industri hiburan, *e-commerce*, *gig-economy*). Pada sektor perbankan juga akan menghadapi masalah likuiditas (*liquidity constraints*) dan kredit macet (*non performing loan*) (Abdurrahman, 2020).

Pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan mengganggu aktivitas *ekonomi* nasional. Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada sektor UMKM yang menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi antara lain dengan menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jumlah/jam kerja karyawan serta jumlah saluran penjualan/pemasaran. Hal ini dapat dilihat dari gambar penjualan UMKM terdampak pandemi berikut:

Gambar 1. Penurunan Penjualan UMKM terdampak pandemi Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM sejak April 2020. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM, yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta atau 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi Covid-19.

Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari *pemerintah* karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produk barang konsumen atau setengah jadi. Apalagi di tengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian tahun ini akan membaik membuat sektor UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih. Namun peranan pemerintah tidak seluruhnya dapat diharapkan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo. Permasalahan usaha pada sektor UMKM saat ini adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat semua sektor UMKM mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya. Selain itu tidak meratanya prioritas bantuan dari pemerintah daerah untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 sampai 2021.

Tabel 1. Data Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Dengan Tahun Lalu

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021
Presentase kenaikan jumlah UMKM	%	0,24	6,3
Presentase kenaikan aset UMKM	%	-0,44	2,4
Presentase kenaikan omset UMKM (juta)	%	-3,26	1,34

Sumber: Disperindag Kabupaten Wonosobo 2022

Pada data tabel di atas dapat dilihat bahwa dampak dari merebaknya virus Covid-19 yang sekarang menjadi sebuah pandemi di seluruh penjuru dunia sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Di Kabupaten Wonosobo untuk presentase kenaikan jumlah UMKM capaian tahun 2020 hanya sebesar 0,24% karena tahun tersebut merupakan titik awal adanya pandemi covid-19, sehingga menyebabkan penurunan presentase kenaikan aset UMKM sebesar -0,44% dan penurunan presentase kenaikan omset UMKM sebesar -3.26%. Namun untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 presentase kenaikan jumlah UMKM mengalami kenaikan menjadi 6,3% dan presentase kenaikan aset pun mengalami kenaikan menjadi 2,4% serta presentase kenaikan omset UMKM juga mengalami kenaikan menjadi 1,34%. Tentu saja tahun 2021 merupakan titik balik bagi para pelaku UMKM untuk melanjutkan usahanya diberbagai bidang.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dilakukan secara virtual. Pemerintah telah yakin bahwa tahun 2022 pandemi akan berakhir dan semua rakyat Indonesia, setidaknya yang rentan, telah divaksinasi untuk melindungi diri dari Covid-19. Jelas juga bahwa semua sektor akan mulai menggeliat di tahun 2022 seiring terbukanya kembali ruang untuk menyelenggarakan ekonomi tanpa khawatir dengan penyebaran virus. Dalam Musrenbangnas 2020, pemerintah telah merencanakan untuk mempercepat tujuh agenda: penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi publik (Media Indonesia, 2020). Semua ini tentunya sebuah gagasan besar yang sulit untuk ditangkap tanpa melihat detail apa saja rencana yang spesifik akan diprogramkan pemerintah. Tetapi setidaknya ada beberapa hal yang cukup pasti dapat terjadi di tahun 2022 dan memberikan dampak yang umumnya positif bagi UMKM dalam kaitannya dengan bisnis global.

Lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang UMKM ini, di samping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, tidak membutuhkan modal (investasi dan operasional), serta paling tahan menghadapi krisis multidimensi yang pernah melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Tetapi, kenyataannya lain menunjukkan bahwa UMKM termasuk golongan pelaku usaha ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal atau aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitasnya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, sering kali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Perkembangan UMKM merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar tercapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha ini merupakan suatu keadaan terjadinya proses peningkatan omset penjualan. Menurut Jeaning Beaver (2017) tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan usaha, dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, serta pertumbuhan pelanggan. Tolak ukur perkembangan usaha harus menggunakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat relatif atau sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkrit tolak

ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami atas dirahinya keberhasilan tersebut (Rizki, 2017).

Prioritas Bantuan Pemerintah

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Wonosobo. Inggit Sumirah, Gunawan Abdilla, Agus Komarudin (2018) dalam penelitiannya menghasilkan sistem pendukung keputusan penentuan prioritas UMKM di Kabupaten Bandung Barat menggunakan metode TOPSIS, dimana proses perhitungan ini membutuhkan kriteria terdiri dari aset, omset, jumlah produksi, jumlah permintaan, jumlah penjualan, tenaga kerja dan kualitas produk. Sistem ini akan menghasilkan rekomendasi penentuan prioritas bantuan UMKM dengan meranking setiap pelaku usaha. Hasil penelitian Dinda Tauresia Febria (2017) mengemukakan bahwa Peran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan UKM. Semakin besar peranan pemerintah akan berdampak positif terhadap pemulihan UMKM Kaki Lima pasca pandemi, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Prioritas Bantuan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pemulihan UMKM Kaki Lima Pasca Pandemi

Restrukturisasi Kredit

Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas (menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001), mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi Kredit menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, Ambarwati (2020) dalam penelitiannya menghasilkan bentuk restrukturisasi kredit berupa penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga dan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindari bank pada kerugian. Hasil penelitian Ernawati Samosir (2021) mengemukakan bahwa Pengaturan Restrukturisasi Kredit berpengaruh terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi Covid-19. Dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit dapat meringankan para pelaku UMKM Kaki Lima yang terdampak pandemi covid-19 sehingga bisa pemulihan UMKM Kaki Lima, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Restrukturisasi Kredit berpengaruh positif terhadap Pemulihan UMKM Kaki Lima Pasca Pandemi

Kredit Modal Kerja

Pengertian menurut (Sinungan, 2014) kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak dengan pihak lain dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang di sertai dengan kontra prestasi berupa bunga. Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah sebuah perjanjian pembayaran yang berupa uang, benda atau jasa yang diterima pada masa sekarang dan kontra prestasinya pada masa yang akan datang. Choirul Hana, Stevanus Gatot Supriyadi (2019) dalam penelitiannya menghasilakn bahwa untuk prosedur kredit modal kerja dilihat dari kesesuaian, kecepatan, ketepatan dan kemudahan yang diterapkan oleh PT. PNM (Persero) ULaMM Kediri Gringging sudah baik. Namun apabila dilihat lebih dalam, untuk kecepatan pegawai dalam menyelesaikan permasalahan debitur memiliki mean rendah, sedangkan untuk persyaratan pengajuan kredit memiliki mean tertinggi. Hasil penelitian Hari Satya Utama (2019) mengemukakan bahwa pemberian kredit berpengaruh terhadap pendapatan UMKM. Adanya kredit modal kerja dapat membantu para pelaku UMKM untuk kembali menjalankan kembali usahanya yang telah terhenti akibat pandemi covid-19, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Kredit Modal Kerja berpengaruh positif terhadap Pemulihan UMKM Kaki Lima Pasca Pandemi

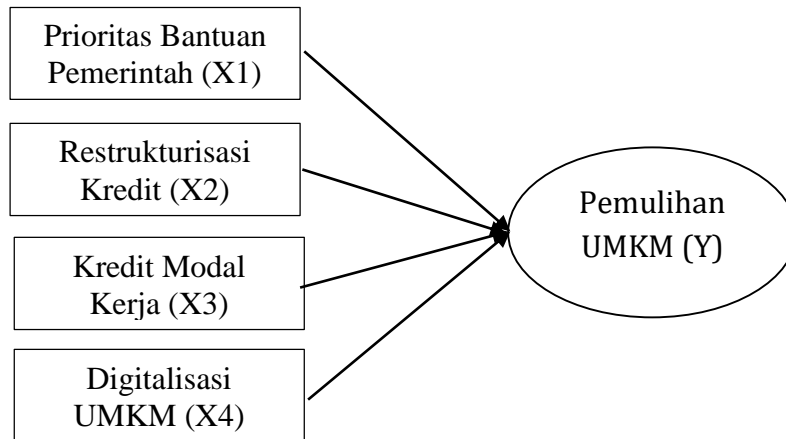
Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, *scanner*, operator media sumber dan *software* pendukung (Sukmana, 2005). Yusida Munsa Idah, Muliastari Pinilih (2019) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa posisi kondisi UMKM yang berbasis digital di Indonesia berapa pada kuadran I. Pada posisi ini, agar dapat mengembangkan digitalisasi UMKM di Indonesia, maka prioritas strategi adalah meningkatkan pangsa pasar ke Luar Negeri, menambah unit produksi, meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan proses penjualan *online*. Dalam penelitian Fitri Rachmawati (2018) mengemukakan bahwa Penerapan Digital Marketing berpengaruh terhadap Pemasaran Produk UKM Pahlawan Ekonomi. Penerapan digitalisasi UMKM dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan sehingga dapat membantu pemulihan bagi para pelaku UMKM Kali Lima Pasca Pandemi, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: Digitalisasi UMKM berpengaruh positif terhadap Pemulihan UMKM Kaki Lima Pasca Pandemi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digunakan suatu bagan untuk menggambarkan paradigma pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Model Penelitian



Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang terdata oleh Disdagkop UMKM Kabupaten Wonosobo, dengan jumlah populasi adalah sebanyak 34.010 UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Kaki Lima yang berada di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Wonosobo sebanyak 100 pelaku UMKM. Dari telaah pustaka dan pengembangan model dalam bentuk kerangka pemikiran teoritis, maka definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator
1	Pemulihan UMKM (Y) Pemulihan UMKM bisa disebut juga sebagai pemulihan ekonomi didefinisikan sebagai bagian awal dari ekspansi, dimana UMKM memperoleh kembali kekuatannya untuk tumbuh dan ditandai mulai meningkatnya produksi dan konsumsi (Mubyanto, 2020).	1. Pertumbuhan Penjualan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Pertumbuhan Keuntungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Rapih, S., Martono, T., & Riyanto, G. (2015)
2	Prioritas Bantuan Pemerintah (X1) Bantuan pemerintah merupakan Bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sri Lestari Rahayu, 2012)	1. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat 2. Memberikan keringanan dengan membebaskan pajak 3. Memberikan bantuan alokasi tempat usaha 4. Memberikan perizinan usaha kepada masyarakat Hamami (2017)
3	Restrukturisasi Kredit (X2) Restrukturisasi Kredit menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam	1. Calon debitur mengetahui tentang restrukturisasi kredit 2. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok

No	Variabel	Indikator
	kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank.	dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan kuat untuk membayarnya. 3. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh analis kredit dan telah disetujui <i>loan committee</i> . 4. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh <i>legal officer</i> . 5. Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit.
4	Kredit Modal Kerja (X3) Kredit modal kerja adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak dengan pihak lain dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang di sertai dengan kontra prestasi berupa bunga (Sinungan, 2014)	Ismail (2019) 1. <i>Capacity</i> (kemampuan) 2. <i>Capital</i> (modal) 3. <i>Collateral</i> (jaminan) Suhardjo (2017)
5	Digitalisasi UMKM (X4) Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, <i>scanner</i> , operator media sumber dan <i>software</i> pendukung (Sukmana, 2005).	1. Produktivitas semakin meningkat 2. Mempermudah dan meningkatkan kinerja usaha 3. Usaha menjadi lebih efektif Arva Bhagas (2018)

Sumber: Kumpulan jurnal penelitian yang diolah, 2022.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel 3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,300	2,152		,139	,890
TOTAL_X1	,362	,101	,324	3,572	,001
TOTAL_X2	,206	,099	,206	2,083	,040
TOTAL_X3	,190	,141	,129	1,342	,183
TOTAL_X4	,214	,107	,185	2,008	,048

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,608 ^a	,369	,343	1,741

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,343 atau 34,3%, hal ini menunjukkan bahwa variabel pemulihan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel peran pemerintah, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja dan digitalisasi UMKM sebesar 34,3%, sedangkan sisanya sebesar 65,7% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Peran Pemerintah terhadap Pemulihan UMKM

Berdasarkan Tabel 3 untuk pengaruh peran pemerintah terhadap pemulihan UMKM dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif peran pemerintah terhadap pemulihan UMKM diterima. Artinya semakin baik peran pemerintah terhadap UMKM, maka akan semakin memaksimalkan kegiatan UMKM secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemulihan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Inggit Sumirah, Gunawan Abdilla, Agus Komarudin (2018) dan penelitian Dinda Tauresia Febria (2017), yang membuktikan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM.

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Wonosobo. Sebagai contoh pelaku UMKM Kaki Lima di kawasan Alun-Alun Wonosobo dan sekitarnya.

Pengaruh Restrukturisasi Kredit terhadap Pemulihan UMKM

Berdasarkan Tabel 3 untuk pengaruh restrukturisasi kredit terhadap pemulihan UMKM H2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif restrukturisasi kredit terhadap pemulihan UMKM diterima. Artinya semakin baik restrukturisasi kredit dalam suatu UMKM, pada akhirnya akan meningkatkan kinerja UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, Ambarwati (2020) dan Ernawati Samosir (2021) yang menyatakan bahwa restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap pemulihan UMKM.

Dilansir dari halaman resmi OJK, restrukturisasi kredit koperasi adalah upaya yang diberikan lembaga keuangan koperasi untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena suatu alasan tertentu. Dalam hal ini restrukturisasi kredit tidak berarti menghapus hutang yang dimiliki oleh debitur, tetapi hanya mengalihkan hutang tersebut melalui beberapa metode, sehingga debitur lebih mudah dalam membayar angsurannya. Jenis keringanan akan diberikan kepada debitur sesuai dengan penilaian dan kesepakatan bersama antara

debitur dan kreditur. Sebagai contoh beberapa pelaku UMKM yang mempunyai kredit dikoperasi mendapatkan restrukturisasi kredit sehingga pemulihan UMKM pasca pandemi dapat lebih cepat terlaksana.

Pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap Pemulihan UMKM

Berdasarkan Tabel 3 untuk pengaruh kredit modal kerja terhadap pemulihan UMKM dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kredit modal kerja terhadap pemulihan UMKM ditolak. Artinya sumber daya modal usaha yang digunakan pelaku UMKM pada awal perintisan usaha, tidak dapat mempengaruhi pemulihan UMKM. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Hana, Stevanus Gatot Supriyadi (2019) dan Hari Satya Utama (2019) yang menyatakan kredit modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan UMKM. Pengertian menurut Sinungan (2014) kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak dengan pihak lain dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang di sertai dengan kontra prestasi berupa bunga. Pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah sebuah perjanjian pembayaran yang berupa uang, benda atau jasa yang diterima pada masa sekarang dan kontra prestasinya pada masa yang akan datang.

Hal ini disebabkan karena sebgai pelaku UMKM di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya sudah memiliki modal yang cukup sebelum mereka memulai usahanya, kredit modal kerja yang telah diberikan kepada pelaku UMKM yang seharusnya digunakan untuk sumber daya modal usaha pada awal perintisan usaha tidak sepenuhnya digunakan tetapi sebagiannya digunakan untuk keperluan konsumsi dan pribadi selain itu modal tersebut bertambah karena mereka juga mendapatkan bantuan dari pemerintah dan instansi lainnya sehingga pelaku UMKM dapat kembali menjalankan usahanya.

Pengaruh Digitalisasi UMKM terhadap Pemulihan UMKM

Berdasarkan Tabel 4.10 untuk pengaruh digitalisasi UMKM terhadap pemulihan UMKM dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif digitalisasi UMKM terhadap pemulihan UMKM diterima. Artinya semakin efektif pemanfaatan digitalisasi UMKM, maka penjualan atas barang atau jasa yang ditawarkan akan lebuh dikenal banyak orang dan dapat meningkatkan penjualan. Hal tersebut sejalan sesuai dengan penelitian Yusida Munsu Idah, Muliastari Pinilih (2019) dan Fitri Rachmawati (2018) yang menyatakan UMKM berbasis digital berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, *scanner*, operator media sumber dan *software* pendukung (Sukmana, 2005). Dalam penelitian ini sudah banyak pelaku UMKM yang menggunakan digitalisasi UMKM sehingga kondisi usahanya cepat pulih dan membaik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai pengaruh peran pemerintah, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja dan digitalisasi UMKM terhadap pemulihan UMKM di Kabupaten Wonosobo, dapat disimpulkan Prioritas Bantuan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pemulihan UMKM (H1 diterima). Artinya semakin baik prioritas bantuan pemerintah terhadap UMKM, maka akan semakin memaksimalkan kegiatan pemulihan UMKM secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemulihan UMKM. Restrukturisasi Kredit berpengaruh positif terhadap Pemulihan UMKM (H2 diterima). Artinya semakin baik restrukturisasi kredit dalam suatu UMKM, pada akhirnya akan meningkatkan kinerja UMKM. Maka dapat dikatakan setiap pelaku dalam UMKM tersebut memiliki komitmen untuk meningkatkan keberlanjutan dan kinerja UMKM mereka. Kredit Modal Kerja tidak berpengaruh terhadap Pemulihan UMKM (H3 ditolak). Artinya pelaku UMKM sudah memiliki modal yang cukup sebelum mereka memulai usahanya, kredit modal kerja yang telah diberikan kepada pelaku UMKM yang seharusnya digunakan untuk sumber daya modal usaha pada awal perintisan usaha tidak sepenuhnya digunakan tetapi sebagiannya digunakan untuk keperluan konsumsi dan pribadi selain itu modal tersebut bertambah karena mereka juga mendapatkan bantuan dari pemerintah dan instansi lainnya. Digitalisasi UMKM berpengaruh positif terhadap Pemulihan UMKM (H4 diterima). Artinya semakin efektif pemanfaatan digitalisasi UMKM, maka penjualan atas barang yang ditawarkan akan lebih dikenal banyak orang dan dapat meningkatkan penjualan sehingga pemulihan UMKM dapat terlaksana lebih cepat dan baik.

Penelitian mendatang sebaiknya mengembangkan model penelitian dengan menambah populasi yang lebih luas sehingga jumlah sampel akan lebih banyak dalam mempengaruhi pemulihan UMKM dan menambah variabel penelitian yang dapat mempengaruhi pemulihan UMKM, misalnya kinerja keuangan dan pencatatan akuntansi. Untuk penelitian mendatang agar menambahkan metode penelitian yang lain seperti wawancara, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Achmady, W. M. (2022). *Peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten pinrang*. Makasar: universitas hasanuddin.
- Choirul Hana, S. G. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Prosedur Kredit Terhadap Keputusan Kredit Modal Kerja Bagi Pelaku UMKM. *Seminar Nasional Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi-UNMER Malang* , 1636-1641.
- Febrina, D. T. (2017). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Inggit Sumirah, G. A. (2018). Sistem Pendukung keputusan Penentuan Prioritas UMKM Di Kabupaten Bandung Barat Menggunakan TOPSIS. *SENSITEK 2018* , 72-76.
- Kaukab, M. E. (2022). Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi. <https://www.suamerdeka.com/opini/pr-042332685/masa-depan-ekonomi-digital-> , 0.

- Kaukab, M. E. (2020). Outlook Internasionalisasi UMKM 2021: Meraih Kesempatan dalam. *Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 02, December 2020* , 154-160.
- Kaukab, M. E., & Yuwono, W. (2020). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. *Jurnal CAPITAL Volume. 3 No 2 , Desember 2020 , Volume. 3 No 2*, 30-50.
- Kaukab, M. E., Putranto, A., & Wibowo, A. F. (2021). Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor yang Mempengaruhi. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol. 2, No. 2, April 2021 , Vol. 2, No. 2*, 206-216.
- Kaukab, M. E. (2021). Pre-Pandemic and Post-Pandemic Outlook of Indonesian Digital Economic Future 2022. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 20(2), 230-240.
- Lina Maya Sari, L. M. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani, Volume 08 No. 01* , 46-57.
- Rachmawati, F. (2018). *Penerapan digital marketing sebagai strategi komunikasi pemasaran terpadu produk usaha kecil dan menengah (ukm) pahlawan ekonomi surabaya*. Surabaya: universitas islam negeri sunan ampel surabaya.
- Rahmah, I., Kaukab, M. E., & Yuwono, W. (2020). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. *JURNAL CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 30-50.
- Yuda, R. (2021). *Analisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan umkm pada masa pandemi covid-19 menurut perspektif ekonomi islam*. Lampung: universitas islam negeri raden intan.
- Yusyida Munsa, M. P. (2019). Strategi pengembangan digitalisasi UMKM. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers* , 195-204.

Lampiran Kuesioner Penelitian

Pemulihan UMKM (Y)

Pemulihan UMKM bisa disebut juga sebagai pemulihan ekonomi didefinisikan sebagai bagian awal dari ekspansi, dimana UMKM memperoleh kembali kekuatannya untuk tumbuh dan ditandai mulai meningkatnyaproduksi dan konsumsi (Mubyanto, 2020).

No	Pernyataan	Skala Likert				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Pertumbuhan Penjualan						
1	Pemulihan UMKM ditandai dengan pertumbuhan penjualan.					
Pertumbuhan Pelanggan						
2	Pemulihan UMKM ditandai dengan pertumbuhan pelanggan.					
Pertumbuhan Keuntungan						
3	Pemulihan UMKM ditandai dengan pertumbuhan keuntungan.					
Pertumbuhan Ekonomi						
4	Pemulihan UMKM ditandai dengan pertumbuhan ekonomi.					

Sumber: Rapih, S., Martono, T., & Riyanto (2015)

Prioritas Bantuan Pemerintah (X1)

No	Pernyataan	Skala Likert				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat						
1	Pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sosial kepada pelaku UMKM					
Memberikan keringanan dengan membebaskan pajak						
2	Bantuan berupa pembebasan pajak perlu diberikan kepada pelaku UMKM					
Memberikan bantuan alokasi tempat usaha						
3	Bantuan berupa alokasi tempat usaha perlu diberikan kepada pelaku UMKM					
Memberikan perizinan usaha kepada masyarakat						
4	Pemerintah seharusnya memberikan perizinan usaha kepada pelaku UMKM.					

Sumber: Hamami (2017)

Restrukturisasi Kredit (X2)

No	Pernyataan	Skala Likert				
		STS (5)	TS (4)	N (3)	S (2)	SS (1)
Calon debitur mengetahui tentang restrukturisasi kredit						
1	Debitur mengetahui apa itu restrukturisasi kredit.					

Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga						
2	Restrukturisasi kredit diberikan apabila debitur mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya namun memiliki kemauan untuk membayar.					
Telah dilakukan analisa ulang kondisi usaha atau keuangan						
3	Restrukturisasi kredit diberikan apabila suatu lembaga keuangan telah melakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur.					
Administrasi harus lengkap dan benar						
4	Restrukturisasi kredit diberikan apabila debitur sudah melengkapi semua persyaratan administrasi yang menyangkut kredit.					
Debitur menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit						
5	Restrukturisasi kredit diberikan apabila debitur telah menyetujui untuk tanda tangan perjanjian restrukturisasi kredit.					

Sumber: Ismail (2019)

Kredit Modal Kerja (X3)

No	Pernyataan	Skala Likert				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
<i>Capacity (Kemampuan)</i>						
1	Kemampuan debitur dianalisa untuk mengukur kemampuan debitur dalam mengembalikan kedit.					
<i>Capital (Modal)</i>						
2	Modal debitur dianalisa untuk mengukur kemampuan debitur dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha.					
<i>Collateral (Jaminan)</i>						
3	Jaminan debitur dianalisa untuk besarnya nilai jaminan yang digunakan sebagai alat pengaman dari debitur kepada kreditur.					

Sumber: Suhardjo (2017)

Digitalisasi UMKM (X4)

No	Pernyataan	Skala Likert				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Produktivitas semakin meningkat						
1	Menjual produk secara <i>online</i> dapat meningkatkan produktivitas.					
Mempermudah dan meningkatkan kinerja usaha						
2	Pemasaran secara <i>online</i> sangat mempermudah dan meningkatkan kinerja usaha.					
Usaha menjadi lebih efektif						
3	Usaha menjadi lebih efektif setelah melakukan penjualan secara <i>online</i> .					

Sumber: Arva Bhagas (2018)